

**ANALISIS RISIKO PEMILIK PROYEK/OWNER SEBAGAI  
PELAKU PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH PADA  
PEKERJAAN KONTRUKSI, STUDI KASUS KABUPATEN  
AGAM**

**TESIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penyelesaian Studi di  
Program Studi Magister Teknik Sipil, Departemen Teknik  
Sipil, Fakultas Teknik Universitas Andalas*



**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

## ABSTRAK

Pekerjaan konstruksi merupakan salah satu jenis pengadaan yang di atur dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (PBJP). Pada pelaksanaan PBJP Pekerjaan konstruksi sangat berpotensi timbulnya risiko-risiko yang dapat berdampak dengan tidak terwujudnya salah satu tujuan dalam PBJP yaitu Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Namun Belum terdapat model manajemen Risiko dalam pelaksanaan PBJP Pekerjaan Konstruksi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. Pada penelitian ini akan dilakukan identifikasi daftar risiko, Menganalisis daftar risiko tersebut untuk menentukan nilai tingkat risiko dan Menentukan rencana aksi perlakuan risiko terhadap daftar hasil analisis risiko pada Pemilik Proyek/Owner selaku PBJP Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Agam. Metode untuk identifikasi daftar risiko adalah dengan melakukan pilot survey terhadap pemilik proyek dari hasil penelitian terdahulu dan study literatur, dilanjutkan dengan tahapan penilaian risiko dengan metoda kuisioner yang disebar terhadap para pelaku PBJP Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten agam dengan mengacu terhadap metode Australian/New Zealand Standard Risk Management(AS 4360), selanjutnya dilakukan tahapan analisis risiko dengan pengelompokan risiko berdasarkan nilai tingkat risiko pertahapan kegiatan PBJP, mulai dari tahapan perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan dan serah terima. Dilanjutkan dengan melakukan rencana aksi perlakuan risiko dengan metode wawancara lanjutan terhadap pelaku PBJP di Kabupaten Agam. 1. Hasil dari Indentifikasi risiko diperoleh total 64 Daftar risiko pada pelaksanaan PBJP pekerjaan konstruksi di Kabupaten Agam, yaitu 15 Risiko pada tahapan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, 9 Risiko pada tahapan pemilihan dan 40 Risiko pada tahapan pelaksanaan dan serah terima. 2. Hasil Penilaian dan Analisis Risiko diperoleh 0 Risiko dengan Kategori Extreme, 10 risiko dengan Kategori High, 53 risiko dengan kategori Moderate dan 1 risiko dengan Kategori Low. Dari hasil penilaian risiko tahapan pemilihan penyedia merupakan tahapan dengan nilai tingkat risiko yang tinggi bagi pemilik proyek dengan risiko tertinggi Jadwal tender mundur karena dibutuhkan waktu evaluasi dokumen yang lebih panjang. Rencana Aksi Perlakuan risiko untuk meminimalisir risiko bagi Pemilik Proyek dalam pelaksanaan PBJP adalah melakukan Koordinasi dengan setiap Stakeholder mulai dari Tahap Perencanaan sampai serah terima pekerjaan, baik itu koordinasi dengan Pimpinan, Pokja Pemilihan, Kontraktor, Masyarakat, Aparat Penegak Hukum, BPBD dan StakeHolder Proyek.

**Kata kunci:** Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pekerjaan Konstruksi, Risiko, Pelaku PBJP, Pemilik Proyek.

## ABSTRACT

Construction work is one of the types of procurement regulated in the Government Goods/Services Procurement (PBJP). In the implementation of PBJP for construction work, there is a high potential for risks that could impact the achievement of one of the objectives of PBJP, which is to produce the right goods/services for every amount spent, measured by aspects of quality, quantity, time, cost, location, and providers. However, there is no existing risk management model for the implementation of PBJP for construction work in the local government of Agam Regency. This study will identify a list of risks, analyze these risks to determine their risk levels, and develop an action plan for risk treatment based on the risk analysis for the Project Owner as the PBJP for construction work in Agam Regency. The method for identifying the risk list is by conducting a pilot survey with project owners based on previous research and literature studies. This is followed by a risk assessment stage using a questionnaire distributed to the stakeholders of PBJP construction work in Agam Regency, referring to the Australian/New Zealand Standard Risk Management (AS 4360) method. Subsequently, a risk analysis stage is conducted by grouping the risks based on their risk levels for each PBJP activity phase, starting from the planning phase, procurement preparation, selection preparation, selection implementation, execution, and handover. The final stage is the development of an action plan to treat risks through follow-up interviews with PBJP stakeholders in Agam Regency. 1. The results of risk identification revealed a total of 64 risks in the implementation of PBJP construction work in Agam Regency: 15 risks in the Planning and Procurement Preparation phases, 9 risks in the selection phase, and 40 risks in the execution and handover phases. 2. The results of the risk assessment and analysis showed 0 risks in the Extreme category, 10 risks in the High category, 53 risks in the Moderate category, and 1 risk in the Low category. The selection phase was found to be the phase with the highest risk level for project owners, with the highest risk being delayed tender schedules due to the need for a longer document evaluation period. The action plan for minimizing risks for project owners in the implementation of PBJP is to coordinate with all stakeholders from the planning phase to the handover of the work, including coordination with leaders, the selection team, contractors, the public, law enforcement agencies, the BPBD, and project stakeholders.

**Keywords:** Government Goods/Services Procurement, Construction Work, Risk, PBJP Stakeholders, Project Owner.

